



EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PERAN PEMERINTAH DALAM TANGGAP DARURAT BANJIR DI KABUPATEN SRAGEN

Aulia Nuriasari¹ dan Jawoto Sih Setyono²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

email : aulianuriasari@gmail.com

Abstrak: Salah satu dampak perubahan iklim adalah terjadinya bencana banjir di beberapa Daerah Aliran Sungai seperti di DAS Bengawan Solo yang merupakan DAS terpanjang di Pulau Jawa. Kabupaten Sragen sebagai bagian dari DAS Bengawan Solo hulu hampir tiap tahunnya mengalami bencana banjir. Adanya kecenderungan peningkatan wilayah terdampak banjir pada dua tahun terakhir (2011-2012) yang disertai dengan belum adanya organisasi dan kebijakan khusus dalam penanganannya mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Sragen kurang mampu untuk mencapai tujuan penanganan banjir tersebut yaitu meminimalisasi kerugian sebagai dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sragen khususnya lembaga yang berperan dalam tanggap darurat. Kinerja dinilai dari aspek efektivitas dengan variabel kualitas dan kecukupan serta aspek efisiensi dengan variabel kejelasan, kesesuaian dan siklus waktu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif kuantitatif serta analisis skoring dan pembobotan. Melalui beberapa analisis tersebut penelitian ini menghasilkan temuan studi yaitu peran lembaga penanganan bencana banjir dalam tanggap darurat di Kabupaten Sragen memiliki kinerja baik (efektif dan efisien). Akan tetapi, kinerja lembaga pemerintah Kabupaten Sragen tersebut dipengaruhi oleh beberapa nilai tinggi dan nilai yang kurang baik menurut hasil penilaian kinerja oleh responden dalam beberapa indikator.

Kata Kunci : Analisis Kelembagaan, Peran Pemerintah, Efektivitas dan Efisiensi

Abstract: One of the impacts of climate change is the occurrence of flood disaster in some areas such as Bengawan Solo watershed, the longest watershed in Java. Sragen Regency as one of the Bengawan Solo upstreams that almost every year experiences the flood disaster. Increased flood inundated area in the last two years (2011-2012), is often accompanied by the absence of a special organization and its policies in any emergency response. The role of local government in Sragen Regency is limited to achieve the purposes of flood management specifically minimize the negative impact of the loss of flood disaster. Therefore, the aims of this research is to analyze the performance of local government Districts of Sragen in particular flood management agencies involved in emergency response flood disaster. The performance is assessed from the aspect of effectiveness (with variable quality and adequacy) and efficiency aspects (with variable clarity, alignment and cycle time). The approach of this research is a quantitative approach with quantitative descriptive, scoring and weighting techniques applied. The finding of this research is the role of local agencies in handling flood emergency response in Sragen Regency has been good (effective and efficient). The performance of the local government in emergency response is influenced by high value and bad value according to the results of performance assessment by respondents in some indicator.

Keywords: Governance Analysis, Role of Government, Effectiveness and Efficiency

PENDAHULUAN

Bencana alam mengakibatkan banyak kesengsaraan dengan kedatangannya yang bersifat periodik. Menurut statistik, sekitar 70% dari bencana-bencana yang diketahui oleh manusia dihubungkan oleh peristiwa hidro-meteorologi. Salah satu bencana hidrometeorologi yang dianggap paling besar dampaknya adalah bencana banjir (APFM, 2004). Lebih lanjut, APFM (2004) mengemukakan bahwa kerugian akibat banjir dialami oleh semua lapisan masyarakat dengan hancurnya hasil panen, hunian, infrastruktur, mesin dan bangunan-bangunan lainnya. Dalam beberapa peristiwa, efek dari banjir tidak hanya berdampak pada tingkat individu namun juga berdampak pada tingkat regional bahkan nasional.

Adanya isu perubahan iklim yang berdampak pada ketidakaturan cuaca dan curah hujan yang tinggi menjadi salah satu pemicu peningkatan peristiwa banjir di beberapa wilayah, termasuk yang terjadi pada beberapa Daerah Aliran Sungai di Indonesia. Wilayah-wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia seperti DAS Bengawan Solo yang merupakan DAS terpanjang di Pulau Jawa mengalami bencana banjir pada musim penghujan. Hal yang serupa dialami oleh Kabupaten Sragen sebagai salah satu bagian dari DAS Bengawan Solo Hulu.

Banjir terbesar dialami Kabupaten Sragen pada Tahun 2007. Menurut Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen (2007), Banjir besar tersebut disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sragen pada Bulan Desember 2007. Sekitar 18 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen menjadi wilayah terdampak banjir. Peristiwa banjir yang berlangsung selama 4 hari tersebut mengakibatkan setidaknya 31 rumah roboh, 7 rumah rusak berat dan 5910 rumah terendam. Selain itu, banjir menelan 2 korban jiwa, beribu hektar sawah terendam dan mengakibatkan putusnya 7 buah jembatan. Arus lalu lintas dari Kabupaten Sragen ke Provinsi Jawa Timur pun menjadi terputus karena tergenangnya jalan Sragen-Mantingan.

Semenjak itu, beberapa penanganan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen baik penanganan secara struktural maupun non-struktural. Akan tetapi, banjir masih terjadi lagi di Kabupaten Sragen pada Tahun 2012. Sampai waktu tersebut belum ada kebijakan dan lembaga khusus penanganan banjir di Kabupaten Sragen. Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan lembaga penanganan banjir di tingkat Kabupaten/Kota sampai Tahun 2013 belum terbentuk sehingga tanggap darurat bencana banjir masih dilakukan secara terpisah oleh Dinas Sosial dan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen. Kendala dalam hal kelembagaan dan tata kelola tersebut disertai dengan adanya kecenderungan peningkatan wilayah terdampak banjir pada dua tahun terakhir yaitu Tahun 2011-2012. Hal itu mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Sragen kurang mampu untuk mencapai tujuan tanggap darurat penanganan banjir yaitu meminimalisasi kerugian sebagai dampak negatif yang ditimbulkan.

Berdasarkan berbagai fenomena dan permasalahan yang ada, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pemerintah dalam tanggap darurat banjir di Kabupaten Sragen dari Tahun 2007 sampai Tahun 2012. Dari pertanyaan penelitian tersebut kemudian terumuskan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu menganalisis kinerja khususnya lembaga penanganan banjir yang terkait dalam tanggap darurat banjir di Kabupaten Sragen dari aspek efektivitas dan efisiensi. Beberapa hal yang dibahas dalam artikel penelitian ini adalah pendahuluan, kajian pustaka, peristiwa dan penanganan banjir di Kabupaten Sragen, metode penelitian yang digunakan, hasil pembahasan serta kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga penanganan banjir di Kabupaten Sragen.

KAJIAN LITERATUR

Tata Kelola

Tata kelola adalah tindakan dalam lingkup kelembagaan yang terwujud dalam interaksi baik antar sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah (*Asian Development Bank*, 1999). Penceriman kualitas tata kelola dapat dilihat dari kapasitas dimana kapasitas dianggap penting bagi pembangunan dalam membantu menentukan dampak ketercapaian kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, *Asian Development Bank* (1999) mengemukakan bahwa esensi dari tata kelola adalah manajemen pembangunan dengan kunci dimensi manajemen sektor publik, akuntabilitas, kerangka kerja legal pengembangan, informasi dan transparansi. Segi efektivitas tata kelola dibangun dalam pondasi tata kelola yang baik (*good governance*) yaitu akuntabilitas, partisipasi, keterprediksian dan transparansi

Pengembangan Kapasitas (Capacity Development)

Kualitas tata kelola dapat tercermin dari kapasitas dan esensi dari tata kelola yang merupakan manajemen pengembangan kapasitas itu sendiri. Pengembangan kapasitas adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu, organisasi, lembaga dan masyarakat yang mengembangkan kemampuan baik secara individu maupun bersama-sama dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan permasalahan dan pencapaian tujuan (UNDP, 1997).

Sementara itu pengembangan kapasitas dalam tata kelola terdiri dari tiga unsur yaitu negara, masyarakat dan sektor privat. Negara membuat lingkungan politik dan hukum yang kondusif sedangkan sektor swasta mendukung penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sementara itu, masyarakat berperan dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Kinerja Organisasi Publik

Dalam pengembangan kapasitas terdapat penilaian pengembangan kapasitas dalam bentuk kinerja sebagai rangkaian dari sistem monitoring dan evaluasi. Penilaian

pengembangan kapasitas merupakan suatu upaya penilaian peran terhadap aktor-aktor yang terlibat. Salah satu bentuk penilaian kapasitas adalah penilaian kinerja aktor-aktor yang terlibat. Horton et al (2003) mengemukakan bahwa kinerja adalah kemampuan mencapai tujuan dan keseluruhan misinya dengan indikator efektivitas, efisiensi, relevansi dan keberlanjutan finansial. Sementara itu, Banarjee et al (2010) mengemukakan bahwa kinerja adalah kombinasi anatara efektivitas dan efisiensi untuk memenuhi tujuan lembaga tersebut. Efektivitas adalah derajat ketercapaian tujuan dari suatu lembaga sedangkan efisiensi adalah perbandingan antara apa yang diproduksi (apa yang ingin dicapai) dengan sumberdaya yang digunakan.

Tanggap Darurat

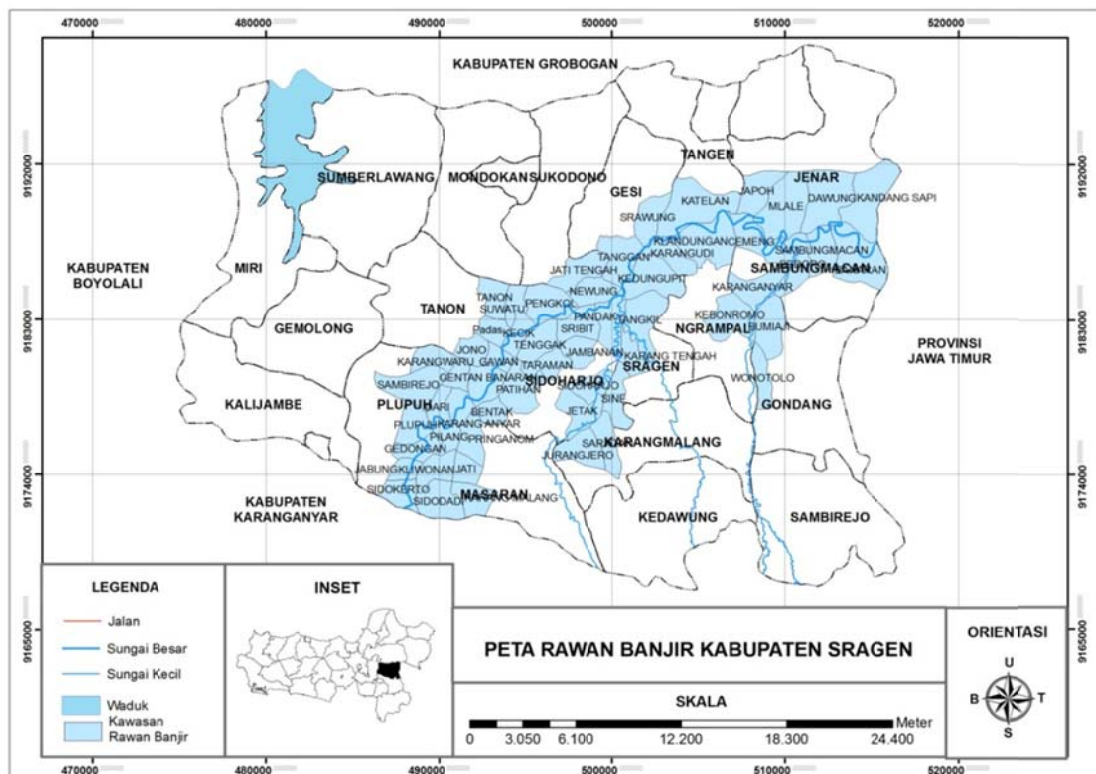
Tanggap darurat adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam suatu siklus manajemen bencana. Manajemen tanggap darurat atau kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanganan kedaruratan, pada saat menjelang, saat darurat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup kesiapsiagaan darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat, termasuk didalamnya adalah transisi darurat ke pemulihan dini (Nurjanah, 2011).

BANJIR DAN PENANGANANNYA DI KABUPATEN SRAGEN

Banjir di Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen merupakan salah satu bagian dari DAS Bengawan Solo bagian hulu. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Sragen dilalui oleh Sungai Bengawan Solo dan beberapa anak sungainya. Kondisi yang relatif datar di wilayah bantaran sungai menyebabkan wilayah bantaran sungai di Kabupaten Sragen merupakan wilayah rawan bencana banjir.

Beberapa daerah di Kabupaten Sragen yang merupakan wilayah rawan banjir dapat dilihat pada peta rawan banjir Kabupaten Sragen dalam **Gambar 1**.



Sumber: Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen, 2010 dan Hasil Olah Data Peneliti, 2013

GAMBAR 1
PETA RAWAN BANJIR KABUPATEN SRAGEN

Kondisi rawan banjir menyebabkan terjadinya beberapa peristiwa banjir di Kabupaten Sragen yang hampir terjadi tiap tahunnya pada musim penghujan. Pada Tahun 2007 Kabupaten Sragen dilanda banjir yang mengakibatkan kerugian di bidang hunian, pertanian dan infrastruktur. Gambaran peristiwa banjir di Kabupaten Sragen Tahun 2007 dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2013

GAMBAR 2
BANJIR DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2007

Menurut Departemen Kesehatan (2009) banjir terjadi lagi di Kabupaten Sragen pada

Tahun 2009. Kali ini banjir merendam 10 kecamatan di Kabupaten Sragen. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Masaran, Tanon, Plupuh, Sukodono, Sragen, Sambungmacan, Gesi, Ngrampal, Sidoharjo dan Gondang. Banjir tersebut mengakibatkan terendamnya 10303 rumah terendam, 9566 sarana air bersih tercemar, dan 3390 warga mengungsi. Gambaran peristiwa banjir di Kabupaten Sragen Tahun 2009 dapat dilihat pada **Gambar 3**.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2013

GAMBAR 3
BANJIR DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2009

Menurut Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen (2012), banjir juga melanda Kabupaten Sragen pada tahun 2012. Sebelas kecamatan di Kabupaten Sragen terendam banjir yaitu Kecamatan Plupuh, Sragen, Gesi, Tangen, Tanon, Ngrampal, Sambungmacan, Masaran, Sukodono, Jenar dan Sidoharjo. Banjir mengakibatkan 10% dari total areal lahan persawahan di Kabupaten Sragen terendam, jalan menuju ke Provinsi Jawa Timur terputus dan sekitar 2968 rumah tergenang. Gambaran peristiwa banjir di Kabupaten Sragen Tahun 2012 dapat dilihat pada **Gambar 4**.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2013

GAMBAR 4

BANJIR DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012

Penanganan Banjir di Kabupaten Sragen

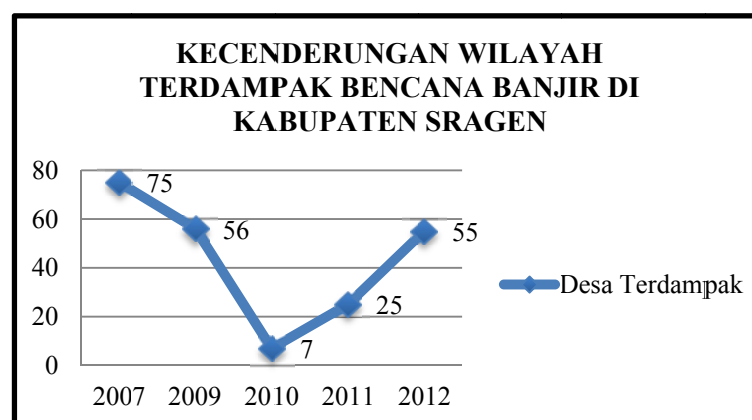
Penanganan bencana banjir di Kabupaten Sragen didasarkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana. Sementara itu kebijakan daerah dalam penanganan banjir khususnya tanggap darurat di Kabupaten Sragen belum terealisasi dalam bentuk Perda.

Kegiatan dan struktur satuan pelaksana penanganan banjir di Kabupaten Sragen masih mendasarkan pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 tanggal 1 Agustus 2006. Berdasarkan peraturan tersebut beberapa tindakan yang dilakukan satuan pelaksana penanganan banjir dalam tanggap darurat antara lain pengaktifan rumah pusat pengendalian operasi satuan pelaksana penanganan banjir, pengerahan kelompok-kelompok yang berperan dalam tanggap darurat, pencarian dan penyelamatan korban banjir, perawatan dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan bantuan darurat.

Koordinasi dalam kegiatan tanggap darurat di lapangan dilakukan oleh lembaga pemerintah Kabupaten Sragen yaitu pihak Kesbangpolinmas. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan dan distribusi bantuan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

Kecenderungan Dampak Banjir di Kabupaten Sragen

Kecenderungan dampak banjir di Kabupaten Sragen dapat dilihat melalui kecenderungan wilayah terdampak dan kerugian yang ditimbulkan pada beberapa sektor. Untuk lebih jelasnya kecenderungan wilayah terdampak banjir di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada **Gambar 5**. Sementara itu, kecenderunganmkerugian akibat banjir di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada **Gambar 6**.



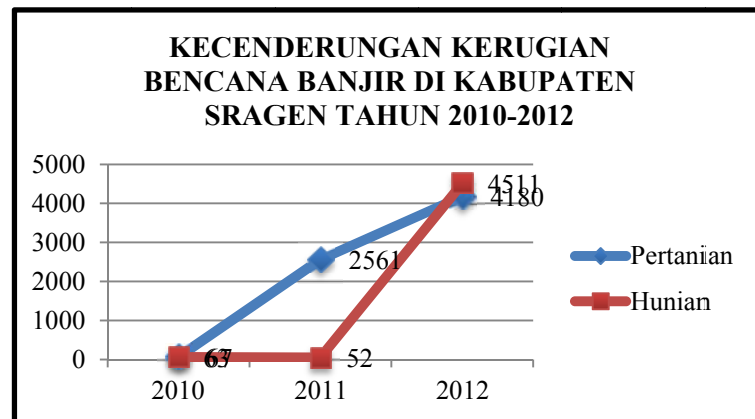
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2013

GAMBAR 5

GRAFIK KECENDERUNGAN WILAYAH TERDAMPAK BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SRAGEN

Gambar 5 menunjukkan bahwa pada Tahun 2009-2010 wilayah terdampak bencana banjir di Kabupaten Sragen mengalami penurunan drastis. Beberapa hal yang mendasari penurunan wilayah terdampak banjir tersebut adalah adanya penanganan banjir secara struktural berupa normalisasi tiga sungai di Kabupaten Sragen secara berturut-turut pada Tahun 2008, 2009 dan 2010. Tidak hanya itu, Kabupaten Sragen juga melakukan penanganan secara non-struktural dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan tanggap darurat pada masyarakat di kawasan rawan banjir sebagai upaya rehabilitasi dari bencana banjir pada Tahun 2007.

Akan tetapi, pada Tahun 2011-2012 terjadi kecenderungan peningkatan wilayah terdampak bencana banjir di Kabupaten Sragen. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh munculnya sedimentasi sungai yang terjadi di DAS Bengawan Solo hulu karena beberapa aktivitas di sekitar bantaran sungai dan penurunan kualitas lingkungan di sekitar DAS Bengawan Solo Hulu. Selain itu, kebijakan dan organisasi penanganan banjir di Kabupaten Sragen belum juga terbentuk untuk memudahkan koordinasi beberapa lembaga pemerintah yang berperan dalam tanggap darurat banjir.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2013

GAMBAR 6
GRAFIK KECENDERUNGAN KERUGIAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SRAGEN

Gambar 6 menunjukkan kecenderungan mengenai kerugian sebagai akibat bencana banjir di Kabupaten Sragen. Setelah banjir besar Tahun 2007 jumlah kerugian yang dapat dilihat kecenderungannya adalah dari sektor pertanian dan hunian. Kedua sektor inilah yang mendapat imbas paling besar saat terjadi bencana banjir karena mayoritas guna lahan di sekitar bantaran sungai adalah lahan sawah serta permukiman. Kecenderungan yang terjadi dari Tahun 2010-2012 adalah peningkatan kerugian kedua sektor tersebut sehingga dalam hal ini baik atau buruknya kinerja yang mengindikasikan peran pemerintah dalam tanggap darurat banjir masih dianggap kurang mampu dalam mencapai tujuan utamanya yaitu pengurangan kerugian akibat banjir. Berdasarkan

wawancara dengan pihak Perangkat Desa terdampak banjir, kerugian sektor pertanian dan hunian akibat bencana banjir memang masih dirasa sulit untuk dihindari atau ditangani oleh pemerintah sebab kerugian tersebut juga dipengaruhi oleh skala banjir dan tingkat curah hujan yang menyebabkan banjir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan analisis skoring serta pembobotan. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mencari rata-rata pada tiap variabel yaitu kualitas, kecukupan, kejelasan, kesesuaian dan siklus waktu. Selain itu, total skor dalam tiap variabel digunakan untuk

mengetahui posisi variabel berdasarkan nilai minimum dan maksimum. Setelah dilakukan analisis deskriptif kuantitatif dilakukan analisis skoring dan pembobotan. Dalam penelitian ini masing-masing variabel akan diberikan bobot untuk mengetahui tingkat efektivitas dan

efisiensi dari kinerja pemerintah dalam tanggap darurat banjir. Gambaran variabel-variabel penelitian yang dianalisis menggunakan skoring dan pembobotan ditunjukkan oleh **Tabel I**.

TABEL I
PEMBOBOTAN VARIABEL DALAM ANALISIS SKORING DAN PEMBOBOTAN

Aspek	Variabel	Bobot (%)
Efektivitas	Quality (Kualitas)	40
	Adequacy (Kecukupan)	60
Total		100
Efisiensi	Clarity (Kejelasan)	40
	Alignment (Kesesuaian)	40
	Time Cycle (Siklus Waktu)	20
Total		100

Sumber : Herrin dan Pernia, 1986 dan Peneliti, 2013

Dari Tabel I tingkat efektivitas atau efisiensi dapat diukur dengan menggunakan rumus :

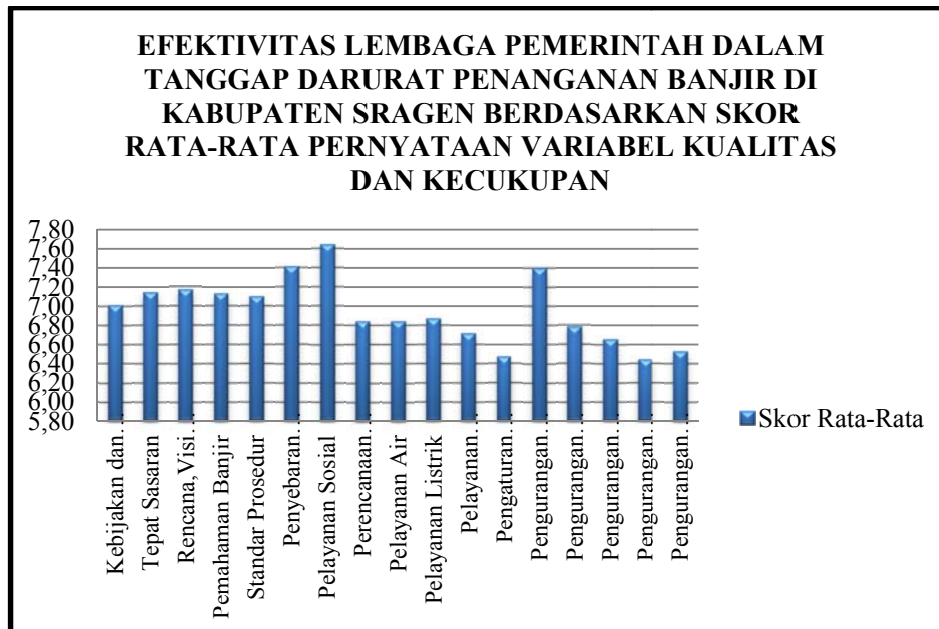
$$\text{Efektivitas} = (\text{Skor kualitas} \times 40\%) + (\text{Skor kecukupan} \times 60\%)$$

$$\text{Efisiensi} = (\text{Skor kejelasan} \times 40\%) + (\text{Skor kesesuaian} \times 40\%) + (\text{Skor siklus waktu} \times 20\%)$$

HASIL PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Lembaga Pemerintah dalam Tanggap Darurat Banjir di Kabupaten Sragen

Efektivitas lembaga pemerintah dalam tanggap darurat berdasarkan skor rata-rata pada butir-butir pernyataan sebagai indikator dapat dilihat pada **Gambar 7**.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2013

GAMBAR 7
GRAFIK EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMERINTAH DALAM TANGGAP DARURAT BANJIR DI KABUPATEN SRAGEN BERDASARKAN SKOR RATA-RATA PERNYATAAN VARIABEL KUALITAS DAN KECUKUPAN

Menurut Gambar 7 skor yang paling tinggi adalah pelayanan sosial. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh pihak Dinas Sosial bahwa pemerintah berperan dalam tanggap darurat banjir terutama pada pelayanan sosial berupa pelayanan sandang, pangan (9 bahan pokok) dan tempat evakuasi pada saat keadaan darurat bencana banjir. Selain memberikan bantuan yang berasal dari anggaran daerah, pemerintah daerah juga mendistribusikan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat maupun dari organisasi lain baik bersifat pemerintah atau non-pemerintah.

Sementara itu skor yang paling rendah adalah pengaturan jalan/kereta api dan pengurangan kerugian uang. Hal tersebut didukung oleh pernyataan beberapa perangkat desa pada kawasan rawan banjir di Kabupaten Sragen bahwa jalan yang tergenang akan secara alamiah dihindari oleh masyarakat melalui komunikasi sosial yang saling bersambung-sambungan (getok tular) sehingga tidak diperlukan pengaturan jalan lebih lanjut oleh lembaga pemerintah. Para perangkat desa juga menyatakan bahwa bencana banjir di Kabupaten Sragen mengakibatkan kerugian yang dominan di bidang pertanian sehingga menyebabkan gagalnya panen dan rusaknya lahan pertanian. Selama ini penanganan banjir baik secara struktural dengan membuat bendungan pada sungai bengawan solo maupun secara non-struktural dengan tanggap darurat belum mampu secara efektif mengurangi kerugian masyarakat di bidang pertanian.

Efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam tanggap darurat bencana banjir :

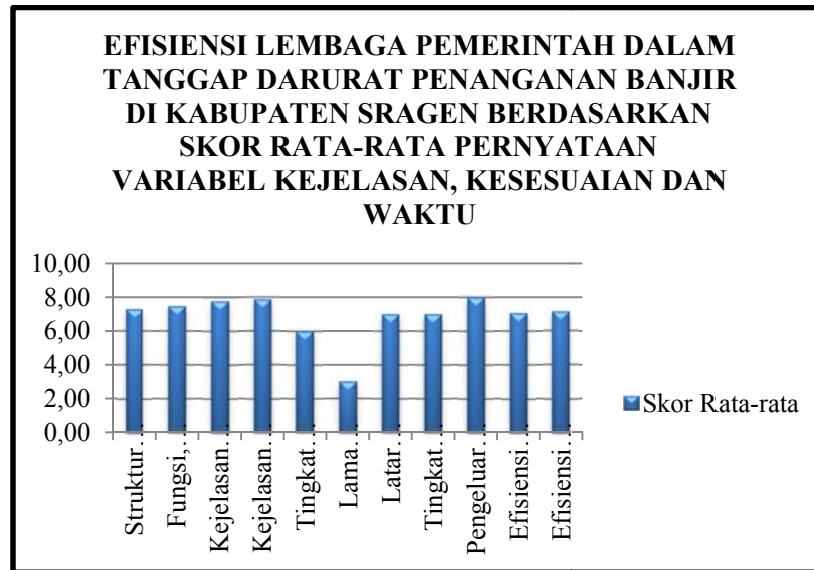
Efektivitas

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Skor kualitas} \times 40\%) + (\text{Skor kecukupan} \times 60\%) \\
 &= (7,111 \times 0,4) + (6,885 \times 0,6) \\
 &= 6,975
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa tingkat efektivitas lembaga pemerintah dalam tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Sragen adalah 6,975. Artinya tingkat efektivitas tersebut telah lebih dari nilai standar yaitu 5,5 (nilai tengah dari 1 sampai 10) sehingga peran lembaga pemerintah dalam tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Sragen dinilai cukup efektif.

Analisis Efisiensi Lembaga Pemerintah dalam Tanggap Darurat Banjir di Kabupaten Sragen

Tingkat efisiensi lembaga pemerintah dalam tanggap darurat penanganan bencana banjir di Kabupaten Sragen ditunjukkan dengan **Gambar 8**. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa skor tertinggi adalah tingkat pemasukan dan pengeluaran lembaga banjir. Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen (2013) diketahui bahwa lembaga pemerintah memiliki sarana dan prasarana tanggap darurat yang berasal dari APBD maupun dari instansi lain. Sarana dan prasarana serta bantuan bahan makanan yang berasal dari beragam sektor baik publik atau swasta mampu dimobilisasi oleh lembaga penanganan banjir terkait. Kondisi sarana dan prasarana tersebut juga sebagian besar berada dalam kondisi baik. Sementara itu skor terendah adalah lama bekerja staf yang berarti lama bekerja staf tanggap darurat penanganan banjir kurang baik. Meskipun terdapat beberapa anggota staaf yang telah bekerja lebih dari 20 tahun dalam bidang tanggap darurat namun terdapat beberapa staf baru yang relatif masih baru dalam bidang tanggap darurat.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2013

GAMBAR 8

GRAFIK EFISIENSI LEMBAGA PEMERINTAH DALAM TANGGAP DARURAT BANJIR DI KABUPATEN SRAGEN BERDASARKAN SKOR RATA-RATA PERNYATAAN VARIABEL KEJELASAN, KESESUAIAN DAN WAKTU

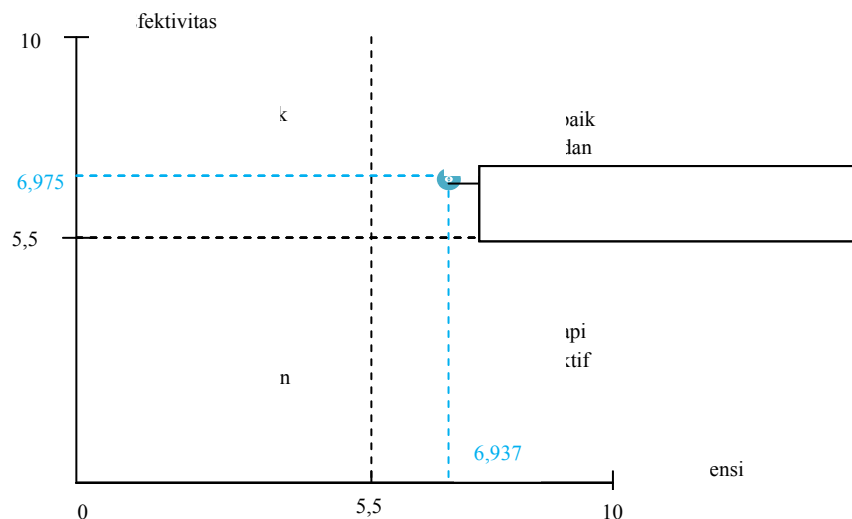
Efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam tanggap darurat bencana banjir:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Skor kejelasan} \times 40\%) + (\text{Skor kesesuaian} \times 40\%) + (\text{Skor siklus waktu} \times 20\%) \\
 &= (7,596 \times 0,4) + (6,2 \times 0,4) + (7,093 \times 0,2) \\
 &= 6,937
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa tingkat efisiensi lembaga pemerintah dalam tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Sragen adalah 6,937 yang berarti

telah melebihi dari nilai standar sebesar 5,5 (nilai tengah 1 sampai 10). Hal tersebut mengindikasikan bahwa lembaga pemerintah dalam tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Sragen cukup efisien.

Dengan demikian, posisi kinerja lembaga pemerintah dalam tanggap darurat penanganan bencana banjir di Kabupaten Sragen dapat digambarkan melalui grafik yang ditunjukkan pada **Gambar 9**.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2013

GAMBAR 9

GRAFIK POSISI KINERJA LEMBAGA PEMERINTAH DALAM TANGGAP DARURAT BANJIR DI KABUPATEN SRAGEN

Dari Gambar 9 dapat diketahui bahwa kinerja lembaga pemerintah dalam tanggap darurat penanganan banjir di Kabupaten Sragen memiliki tingkat efektivitas 6,975 dan tingkat efisiensi sebesar 6,937 sehingga termasuk dalam kategori kinerja baik (efisien dan efektif). Dari gambar tersebut juga diketahui bahwa tingkat efisiensi memiliki nilai yang hampir sama dengan efektivitas. Luasan kinerja mengindikasikan bahwa efektivitas dan efisiensi dari lembaga penanganan banjir di Kabupaten Sragen mendekati capaian 70% dari kinerja maksimum.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari hasil penelitian Efektivitas Dan Efisiensi Peran Pemerintah dalam Tanggap Darurat Banjir di Kabupaten Sragen diperoleh temuan studi bahwa kinerja lembaga penanganan banjir dalam tanggap darurat memiliki tingkat efektivitas sebesar 6,975 dan tingkat efisiensi sebesar 6,937 sehingga termasuk dalam golongan efektif dan efisien. Terbentuknya tingkat efektivitas dan efisiensi lembaga penanganan banjir tersebut dipengaruhi oleh tingginya sub variabel pelayanan sosial pada variabel kecukupan dan sub variabel pendanaan lembaga penanganan banjir pada variabel kesesuaian dengan nilai 8.

Rekomendasi

Rekomendasi yang ditawarkan pada penelitian ini adalah percepatan pembentukan Badan Penanganan bencana banjir di Kabupaten Sragen (BPBD). Pembentukan BPBD hendaknya merupakan penggabungan dari lembaga-lembaga yang selama ini berperan dalam tanggap darurat yaitu bagian penanganan bencana Kesbangpolinmas dan bagian bantuan sosial Dinas Sosial sebab berdasarkan temuan studi kinerja lembaga penanganan banjir di kabupaten Sragen saat ini telah mencapai 70% dari kinerja maksimal. Penggabungan dilakukan dalam bentuk alokasi sumberdaya manusia, finansial dan program dari kedua

lembaga tersebut. Kemudian memberikan pelatihan kepada staf organisasi pemerintah penanganan banjir tentang tanggap darurat serta menempatkan staf organisasi pemerintah penanganan banjir sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. 1999. *Governance: Sound Development Management*. Manila : Asian Development Bank
- Banerjee et al. 2010. *Measuring Capacity*. United Nation Development Programme : UNDP Headquarters, Regional and Country Offices.
- APFM. 2004. *Integrated Flood Management : Concept Paper*. The Associated Programme on Flood Management Technical Document No.1. Second Edition. [online] Available at : http://www.apfm.info/pdf/concept_paper-e.pdf. Diakses pada tanggal 19 Desember 2012.
- _____. 2006. *Legal and Institutional Aspects of Integrated Flood Management*. The Associated Programme on Flood Management Technical Document No.2. Flood Management Policy Series. Geneva : APFM.
- Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen. 2007. *Laporan Kejadian Banjir di Kabupaten Sragen Tahun 2007*. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lintas Masyarakat Kabupaten Sragen.
- Horton, et al. 2003. *Evaluating Capacity Development Experiences from Research and Development Organizations around the World*. The Hague : ISNAR.
- Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung : Alfabeta
- UNDP. 1997. *Capacity Development*. United Nation Development Programme Advisory Paper 2. New York : Management Development and Governance Division of United Nation Development Programme.